



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 814/V/2014

I/MEI 2014



## **Ketahanan Pangan Harus Jadi Prioritas**



# Ketahanan Pangan Harus Jadi Prioritas



Ketua Komisi IV DPR RI HM Romahurmuziy.

Komisi IV DPR menilai ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Pasalnya, pertumbuhan dan dinamika perkembangan penduduk Indonesia berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPR HM Romahurmuziy saat pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta dan jajarannya, di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, baru-baru ini. Gubernur DIY diwakili Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam IX.

Ketua rombongan HM Romahurmuziy mengatakan perlu upaya serius pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi peran strategis dibidang pertanian, perikanan dan Bu-

log harus memberi perhatian khusus sekaligus menjadi tantangan kita ke depan.

Romi biasa dipanggil mengatakan, dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR sengaja memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta karena di Provinsi ini pada tahun 2013 mengalami penurunan produksi padi yang terjadi pada saat produksi nasional mengalami kenaikan sekitar 2,24 juta ton atau sekitar 3,24 persen.

Untuk itu, DI Yogyakarta menjadi menarik karena data BPS menunjukkan bahwa luas panen padi, pada tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2012 dari 152,912

hektar menjadi 159,266 hektar atau naik 4,16 persen.

Bertambahnya luas panen padi, lanjutnya, tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas padi. Seperti diketahui, produktivitas padi di DI Yogyakarta justru mengalami penurunan dari 61,88 ku/ha menjadi 57,88 ku/ha sehingga berpengaruh terhadap produksi padi, yang mengalami penurunan dari 946,2e4 ton menjadi 921,824 ton atau turun sebesar 2,58 persen.

Dia mengatakan, penurunan produksi padi di Yogyakarta diindikasikan karena penurunan luas panen padi sawah akibat kekeringan yang melanda berbagai daerah DIY. Selain itu,

penurunan luas panen juga disebabkan alih fungsi lahan yang masih sebagai konsekuensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### Tinjau PPI Sadeng

Tim Kunker Komisi IV juga berkesempatan meninjau pengerukan yang dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sadeng, Gunung Kidul serta program pengadaan kapal nelayan Inka Mina 30GT. Seluruh kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Kita datang sekaligus melaku-

kan pengawasan. Komisi IV pernah menyetujui anggaran pengerukan PPI Sadeng, kita dukung program pengadaan 1000 kapal Inka Mina pengadaan tahun anggaran 2010-2014. Bagaimana realisasinya kita cek kesini,” paparnya.

Dalam kunjungan itu Tim Kunker juga mendapati ada kapal bantuan yang belum dapat beroperasi karena ketidakharmonisan antara anggota kelompok. Ia meminta pemerintah dapat memfasilitasi dan melakukan mediasi agar permasalahan tuntas dan kapal dapat segera digunakan.

Politisi F-PPP ini menambahkan DIY sebenarnya memiliki potensi kelautan yang cukup besar terutama dengan adanya pangkalan pendaratan ikan (PPI) Sadeng yang sudah bertaraf nasional. Dalam kunjungan ini Romi bersama rombongan Tim Kunker berdialog langsung dengan para nelayan yang baru saja melaut.

“Harapannya para nelayan yang tergabung dalam koperasi ini bisa menjaga kebersamaan. Pemerintah perlu memfasilitasi agar mereka bisa bermitra dengan swasta atau perbankan diantaranya untuk menambah modal usaha,” ujar dia. (spy) foto: *supri/parle/hr.*

## Perlu Sinergi Untuk Evaluasi Pelaksanaan Otda

Ada yang salah dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR Soemandjaja kepada Parle, Rabu (30/4).

Politisi dari fraksi PKS ini mengatakan bahwa sebenarnya dari sisi aturan atau perundang-undangan tentang otonomi daerah tidak ada yang salah, namun pelaksanaannya saja yang belum sempurna. Mengapa demikian? Hal tersebut terlihat dari adanya 322 dari 524 Kepala Daerah yang terindikasi korupsi.

“Dengan adanya 322 dari 524 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang artinya lebih dari setengahnya yang terindikasi korupsi.

Hal itu membuktikan bahwa ada yang salah disini. Ada sistem pelaksanaan otda yang berjalan dengan tidak baik. Padahal kan tujuan dari otonomi



Anggota Komisi II DPR RI Soemandjaja (F-PPS).

daerah adalah menciptakan pemerintahan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Oleh karena itu menurut Soeman, begitu ia biasa disapa, perlu sebuah evaluasi mendasar dari sistem otonomi daerah itu sendiri. Evaluasi itu menu-

rut Soeman menyangkut penggunaan APBN/APBD dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah otonomi baru tersebut.

Selain itu, ditambahkan Soeman ke depannya perlu sikap arif dari pemerintah dan DPR untuk tidak memaksakan status otonomi sebuah daerah. Dimana harus dilihat juga kemampuan komponen-komponen di dalamnya.

“Sebagaimana tiga fungsi yang diemban DPR, legislasi, pengawasan dan *budgeting*, kedepannya DPR dan DPRD harus bersinergi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut. Termasuk pengawasan terhadap penggunaan APBN dan APBD,” tegas Soeman sambil mengingatkan bahwa tujuan dari otonomi daerah itu sebenarnya untuk menyejahterakan rakyat secara adil dan merata. (Ayu)

## Pemilu di Sampang Penuh Kecurangan

Pemilu di Sampang, Madura, ditengarai penuh kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tingkat KPUD hingga KPPS. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Sampang, kecurangan selalu ditemukan.

Fakta ini diungkap caleg dari dapil Jatim II Achsanul Qo-

sasi yang juga Anggota DPR RI dari F-PD. Dalam konferensi pers di Press Room DPR, Selasa (29/4), Achsanul mengungkapkan, kecurangan pemilu sudah di luar batas kewajaran. Padahal dirinya mengaku sudah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ternyata pemilu tetap saja masih diwarnai kecurangan yang masif.



Achsanal Qosasi Anggota DPR RI (F-PD).

Kecurangan itu dilakukan oleh para caleg yang tidak jujur dengan para penyelenggara pemilu di Sampang. Bawaslu setempat harus betul-betul mencermati hal ini. Pemilu di Sampang sempat diulang karena banyaknya temuan kecurangan. Sementara Achsanul sendiri mengaku sudah

meraih suara 49.000 dari dapil Jatim II.

“Bawaslu harus cermati pemilu di Madura. Banyak caleg jujur justru dicurangi,” tutur Achsanul.

Dalam konferensi pers tersebut, Achsanul didampingi seorang pengacara M. Soleh yang aktif mengamati penyelenggaraan pemilu di daerah. Soleh memperlihatkan rekaman video kepada para wartawan seputar kecurangan yang dilakukan para penyelenggara pemilu di Sampang. Terlihat panitia di TPS memasukkan banyak sekali surat suara ke kotak suara. Surat suara tersebut ternyata sudah dicoblos sendiri oleh panita.

Berdasarkan kesaksian Soleh, surat suara untuk DPRD Provinsi dan DPR RI tidak dibagikan kepada para pemilih saat pencoblosan. Yang dibagikan hanya surat suara untuk DPRD Kabupaten dan DPD RI. Surat suara DPRD Provinsi dan DPR RI diduga sudah dipesan oleh oknum caleg untuk dicoblos namanya. Bilik suara juga tidak ditaruh di atas meja, melainkan di atas tanah. Suasannya terlihat jadi seperti pasar kaget. Kecurangan begitu vulgar terjadi. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

## Sekjen DPR Ungkapkan Keprihatinan Tenggelamnya Kapal Sewol

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti mengungkapkan keprihatinannya atas tenggelamnya Kapal Feri Sewol Korea Selatan yang memakan korban jiwa hingga 300 orang.

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan consuller Korea Selatan yang baru, Sum Nahm Kook, baru-baru ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Saya ungkapkan keprihatinan kepada rakyat Korea Selatan terhadap kecelakaan tenggelamnya kapal Feri sewol yang memakan korban jiwa sangat banyak, bahkan kabarnya sampai membuat Perdana Menteri Korsel mengundurkan diri dari jabatannya,” ungkap Win, begitu ia biasa disapa.

Dijelaskan Win kepada Parle, sebenarnya kunjungan Kook sebagai consuller Korsel yang baru itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua Negara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bidang keparlemenan. Hubungan kerjasama itu ditandai dengan adanya pertukaran staff parlemen. Tujuannya tak lain untuk saling belajar



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat menerima consuller Korea Selatan, Sum Nahm Kook.

tentang tugas dan peran kesetjengan dalam mendukung kinerja dewan.

Bahkan untuk mempererat kerjasama, kedua negara beberapa kali juga kerap saling berkunjung. Diawali dengan kunjungan Sekjen Parlemen Korsel pada Desember 2013 silam. Kemudian Kesetjengan DPR bersama dengan Deputi Anggaran melakukan kunjungan balasan ke Korea Selatan dengan mengunjungi *National Budget Office South Korea*.

Win dan Kook sama-sama berharap agar hubungan antar Indonesia dan Korea Selatan tetap berjalan dengan baik. Pada kesempatan itu Win juga mengungkapkan sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mendukung segala hal yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sesungguhnya hidup berdampingan secara damai dengan semua bangsa dan negara di dunia ini merupakan anugerah yang sangat indah. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.



# Indonesia Perlu Berkonsentrasi Wujudkan Kembali Negara Maritim

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyatakan bahwa dari awal berdirinya negeri ini, Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara maritim dan agraris. Panjang garis pantainya terpanjang kedua di dunia.

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km sesuai yang diumumkan PBB pada 2008. Namun data tersebut di-anulir oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 yang berhasil mengadakan survei ulang. Hasilnya, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 km. Sedangkan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia adalah Kanada yaitu 202.080 km.

“Karena itu harus dipetakan kembali untuk mengukur seberapa banyak sumberdaya alam yang terkandung di bumi Nusantara ini,” kata Firman Soebagyo saat dihubungi Parle baru-baru ini. Sebagai negara pertanian, kata dia, tentu layak Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan.

Untuk itu dia berharap, pemerintah kembali berkonsentrasi mewujudkan kembali Indonesia sebagai negara maritim dan juga negara agraris yang kuat. Itu sebabnya, Firman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil mengembangkan sektor pertanian menjadi industri pertanian olahan dan mengoptimalkan peran sebagai negara maritim dengan hasil perikanan yang banyak.

Hingga November 2013, produk hasil olahan perikanan mencapai 5,16 juta ton atau naik 6,8% dari tahun sebelumnya. Produksi perikanan sebanyak itu mampu menghasilkan pendapatan sebesar US\$ 3,77 miliar dan diperkirakan meningkat hingga US\$ 4,5 miliar di akhir tahun ini. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Soetardjo, negara tujuan ekspor olahan ikan antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Di akhir 2013, kontribusi sektor pertanian mencapai Rp 291,79 miliar, atau naik 14,28% dari tahun 2012.

“Kami yakin sektor kelautan dan perikanan memiliki peran sangat penting dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku bagi industri, sumber penerimaan devisa, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” tuturnya.

Untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya sektor perikanan dan kelautan, kata Firman, diperlukan banyak regulasi. “Tentu, yang kita buat adalah regulasi yang harus berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pihak asing,” kata Firman.

Dia pun mengungkapkan, tidak ada satu negara pun yang mau lebih mengutamakan menjunjung keputusan *World Trade Organization* (WTO). Contohnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) sejak 1993 tetap saja memberikan subsidi kepa-



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo (F-PG).

da petani untuk keempat komoditas unggulan, yaitu gandum, kedelai, jagung, dan kapas.

Agar tidak tergantung dari impor, Firman mengusulkan dibentuknya lembaga penyangga pangan nasional. Lembaga itu pulalah yang akan menyiapkan program menuju terwujudnya swasembada pangan.

## Kembali Ke Senayan

Firman Subagyo berasal dari Dapil III Jawa Tengah meliputi Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang dan Pati. Politisi senior yang juga petahana Firman Soebagyo berhasil kembali lolos ke Senayan, dengan meraup suara sebanyak 90.757 yang berhasil dikantonginya dari hitung manual KPU.

“Alhamdulillah, saya kembali mendapat amanah dari rakyat. Kepercayaan ini, akan saya jaga dan aspirasi mereka akan saya perjuangkan lebih baik dan maksimal di Senayan,” ujar Firman ketika menanggapi hasil perolehan suaranya tersebut.

Menurut Ketua DPP dan Koordinator Bidang Pemena-angan Pemilu Jawa II Partai Golkar itu, perolehan suaranya pada Pileg 2014 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 81 persen dibanding Pileg 2009 lalu.

Lima tahun silam, pria asli Pati ini hanya mampu meraup 49.935 suara dari dapilnya tersebut. Menurutnya, kenaikan suaranya ini, membuktikan rakyat masih percaya dan menilai kinerjanya baik selama lima tahun menjadi legislator.

“Saya siap mengemban dan memperjuangkan rakyat lebih baik lagi, untuk lima tahun ke depan,” ujar politisi Partai Golkar ini. (As)/foto:iwan armanias/parle.

# Legislator Dukung Pengusutan Kasus e-KTP

Anggota DPR Yasonna H. Laolly mendukung sikap tegas KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. “Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, maka harus ditindak tegas. Saya yakin Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengusutan, karena ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” tegasnya menjawab Parlemen saat dihubungi di Dapil Nias, Sumut, Selasa (29/4).

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi KTP Elektronik atau e-KTP, yang diperkirakan nilai proyeknya mencapai Rp 6 triliun lebih. Dari proyek tersebut, diperkirakan jumlah kerugian negara mencapai Rp 1,12 triliun.

Sebagai tindak lanjut pengusutan tersebut, KPK telah memanggil Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara Najoa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk Pejabat Pembuat Komitmen Proyek e-KTP Sugiharto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Yasonna, Komisi II DPR sebagai mitra kerja Kemendagri melakukan pembahasan tentang proyek e-KTP tersebut. Pada saat itu Komisi II



Anggota Komisi II DPR RI Yasonna H. Laolly (F-PDIP).

mendukung sebagai program pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem administrasi kependudukan. “Program yang baik dan bermanfaat bagi rakyat pasti kami dukung. Adapun kemudian terjadi penyelewengan, itu di luar domain kami,” tukas politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.

Lagi pula, sambungnya, Komisi II sudah mengingatkan dengan keras jangan sampai ada penyelewengan, sebab program itu cukup besar dengan dana yang besar pula. Dalam perjalanannya proyek e-KTP yang semula ditargetkan selesai sekian tahun tetapi ternyata meleset. “Karena itu saya dukung pengusutan kalau terjadi

penyelewengan, apalagi menyangkut uang negara yang cukup besar, siapapun yang terlibat harus diusut,” tandas Yasonna.

Selain telah menetapkan satu tersangka dan menghadirkan saksi Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara Najoa, KPK juga telah memanggil Direktur Produksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Yuniarto sebagai saksi.

Penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya yakni Kasubdit Identitas Penduduk Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Drajat Wisnu Setyawan, PNS Kemendagri Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi, Suciati berprofesi sebagai PNS, Mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Andres Ginting dari pihak Swasta.

Menurut jubiir KPK Johan Budi, KPK sudah melakukan pengecekan di beberapa tempat seperti di PT Quadra Solution, Menara Duta 7th - Jl H.R Rasuna Said Kav B 9 Jaksel. Kantor Ditjen Dukcapil Jl TMP Kalibata-Jakarta Selatan. Ditambahkan Johan, KPK juga telah menggeledah kantor Mendagri Gamawan Fauzi. Dari hasil pengecekan di beberapa tempat, penyidik menyita beberapa dokumen baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. (mp)/foto:andri/parle/iw.

## Hari Buruh Tahun Ini Usung Tiga Layak

Hari Buruh yang biasa diselenggarakan pada 1 Mei, kini akan terasa berbeda karena bersamaan dengan tahun politik. Transisi politik mewarnai hari istimewa bagi para buruh di Indonesia. Para buruh berharap ada perubahan signifikan, seiring pergantian kekuasaan.

Demikian mengemuka dalam konferensi pers persiapan Hari Buruh yang disampaikan Anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka (F-PDI), di Press Room DPR, Selasa (29/4). Ia didampingi para aktivis buruh dari berbagai daerah. Rieke menyampaikan bahwa tahun



Anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka (F-PDI) didampingi aktivis buruh.

ini, tema Hari Buruh mengusung “Tiga Layak”, yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

Rieke menjelaskan, kerja layak berarti menghapus sistem kerja kontrak dan *outsourcing* yang merupakan bentuk perbudakan modern. Soal upah layak, pemerintah dihimbau untuk tidak melakukan politik upah murah. Sebaliknya, pekerja dan buruh harus diberi penghargaan atas dedikasi pekerjaannya. Sementara menyangkut hidup layak, negara harus melengkapi prasyarat kehidupan yang sejahtera bagi para buruh.

Di tahun politik ini, semua tema yang

diusung itu diharapkan bisa terealisasi dengan baik. Pergantian kepemimpinan nasional usai pemilu, membawa harapan segar bagi para buruh yang tak pernah lelah menuntut kesejahteraan dan perubahan UU Ketenagakerjaan yang masih membelenggu para buruh.

Selain itu, sambung Rieke, ada satu hal yang juga perlu dicermati bahwa menyambut Komunitas ASEAN 2015, akan ada liberalisasi tenaga kerja. Pekerja dan buruh di Indonesia harus mendapat perlindungan yang cukup sebelum pemberlakuan Komunitas ASEAN pada 2015. Pekerja asing akan ikut bersaing di dalam negeri.

Saat ini, kata Rieke, data BPS menyebutkan ada 118,2 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah itu yang terserap sebagai pekerja formal hanya 46,6 juta jiwa. Sementara sekitar 8 juta orang jadi tenaga kerja tidak terdidik sebagai TKI di berbagai negara. Terakhir, yang tidak kalah dicermati adalah masalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri. Kenaikan itu harus ditolak, karena punya efek domino termasuk bagi para buruh. Buruh menghadapi banyak ancaman PHK seiring kenaikan TDL bagi industri.

(mh)/foto:odjie/parle/iw.

## Mahasiswa Harus Dorong Orang Baik Masuk DPR

Untuk mewujudkan DPR yang lebih baik, lebih berkualitas maka segenap potensi terbaik di negeri ini harus didorong untuk memperkuat lembaga perwakilan ini. Mahasiswa yang memiliki semangat dan pemikiran kritis seharusnya juga mengambil peran mendorong anak bangsa terbaik menjadi anggota DPR.

“Adik-adik mahasiswa punya peran mendorong orang baik mau masuk DPR, kalau tidak DPR kita bisa tambah buruk. DPR itu isinya parpol, jadi yang pintar dan baik masuklah ke parpol nanti bisa ikut membenahi,” kata Kabiro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko saat menerima rombongan studi tur STIA YPPT Priangan Timur, Tasikmalaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa(29/4/14).

Ia juga menyebut kecenderungan media pada paradigma *bad news is a good news* sehingga kalau bukan berita buruk maka tidak akan jadi berita. Pada akhirnya pemberitaan buruk tentang DPR lebih mendominasi ruang publik padahal cukup banyak hal positif yang telah dilakukan DPR.

“DPR itu punya Badan Kehormatan yang bertugas menjaga etik dan kehormatan anggota dewan. Kalau ada yang melenceng akan diberi sanksi,



Kabiro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko saat menerima rombongan studi tur STIA YPPT Priangan Timur, Tasikmalaya

ada kok anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh BK,” lanjutnya. Dalam kesempatan itu Djaka juga memaparkan kinerja dewan sesuai 3 fungsi utama yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi.

Peserta studi tur juga menyampaikan pertanyaan kritis terkait produk legislasi yang telah dihasilkan dewan. Yusep mahasiswa jurusan Administrasi Negara mempertanyakan kenapa Provinsi Aceh memiliki partai politik sendiri. “Untuk menjaga konsep ke-Indonesia-an kita, parpol khusus itu seperti menanam benih kehancuran,” tuturnya lantang.

Sementara Prayudi Pengestu menanyakan tentang dana aspirasi masyarakat yang diberikan kepada anggota dewan yang menurutnya tidak transparan. Inilah salah satu hal yang membuat kredibilitas DPR menjadi turun.

Terkait citra negatif dewan, Erwin dari jurusan Administrasi Niaga memberitakan catatan. “Memang benar media banyak menulis yang negatif tapi saya yakin masih ada yang positif dari DPR kita yang luput dari pemberitaan media. Buktinya DPR masih tetap eksis dan kita mahasiswa masih berminat datang studi tur kesini,” pungkask dia. (iky)/foto:andri/parle/iw.

# Stasiun Karantina Ikan Sleman Minim Tenaga Kerja



Ketua Komisi IV DPR HM Romahurmuziy, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi D.I. Yogyakarta.

Stasiun Karantina Ikan kelas II Adi Sucipto Sleman Yogyakarta masih banyak kekurangan tenaga Kerja kontrak maupun harian. Kurangnya tenaga kerja yang terjadi juga tidak hanya di stasiun Karantina ikan kelas II Adi Sucipto Sleman Yogyakarta, akan tetapi juga terjadi hampir di seluruh Stasiun Karantina Ikan di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPR HM Romahurmuziy, saat melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi D.I. Yogyakarta Senin (28/4) siang.

Romahurmuziy menambahkan, kedepan perlu dilakukan terobosan untuk membuat keputusan mengenai tenaga kerja di wilayah Stasiun Karantina Ikan ini agar dapat teratasi. “Men-

ganai bentuknya bisa tenaga honorer yang terpenting semua pelayanan tidak terbengkalai seperti sekarang ini,” kata Romy.

Dia juga mengatakan mengenai fasilitas juga masih sangat minim sementara kebutuhan fasilitas uji tiap tahunnya mengalami perubahan teknologi. Saat Kunker, jajaran stasiun Karantina Ikan meminta dukungan politik anggaran DPR untuk membangun Stasiun Karantina Ikan yang baru agar mampu mengejar perubahan perkembangan teknologi yang setiap tahunnya berkembang secara terus menerus.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy yang memimpin rombongan Kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Propinsi DI

Yogyakarta mengemukakan, kemungkinan Stasiun Karantina Ikan yang selama ini terpisah dari Kementerian Perikanan akan disatukan, dan dengan penyatuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya serta agar lebih efisiensi dapat terlaksana.

“Akan tetapi tentunya dengan syarat yaitu bahwa kita perlu merubah Undang-Undang Karantina terlebih dahulu, supaya dapat disatukan antara Stasiun Karantina Ikan dengan Kementerian Perikanan,” ujar Romahurmuziy.

Menyinggung masalah keamanan, Romahurmuziy mengatakan, masalah keamanan yang ada dikarantina ikan Yogyakarta terkait dengan kebutuhan yang masuk keamanannya masih aman dan belum terlalu tinggi risikonya, justru yang terlalu besar itu adalah yang keluar, namun kalau kita bicara tentang keluar artinya peluang usaha pembudidaya ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya lebih tinggi.

Hal seperti ini, lanjutnya, sejalan dengan statistik nasional dimana masyarakat mulai melakukan budidaya ikan dibandingkan dengan budidaya perikanan tangkap. Dikatakan juga, hal seperti itu harus disiapkan karena tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri yang tingkat konsumsi individunya sudah diatas rata-rata dunia, tetapi juga kebutuhan dunia internasional dimana Indonesia masih memiliki peluang besar untuk itu. (Spy)/  
foto:supriyanto/parle/hr.

## Kebebasan Media Harus Diiringi Tanggungjawab

Masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan media bisa mengadukannya ke Dewan Pers. Hal tersebut diungkapkan Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO, Arif Zulkifli saat workshop jurnalistik Bagian Pemberitaan DPR RI dan CEPP UI (Center for Election and Political Party Universitas Indonesia), bertajuk Reportase dalam Jurnalisme Masa Kini,

Kamis (24/4) di Depok, Jawa Barat.

Dikatakan Arif, ada hal yang patut disyukuri adanya reformasi sejak beberapa tahun yang lalu, salah satunya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tidak hanya kebebasan berpolitik, namun juga salah satu



Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO, Arif Zulkifli.

elemennya kebebasan membuat media massa. Jika sebelumnya untuk membuat media terlebih dahulu harus ijin Kementerian Penerangan (saat ini berubah nama menjadi Kemenkominfo-red), namun sekarang hanya perlu melapor saja.

“Meski demikian, hendaknya kebebasan media itu juga harus diiringi dengan tanggungjawab atau etika yang utuh dari seluruh pihak yang ada dalam media tersebut,” jelas Arif.

Bahkan dilanjutkannya, jika memang ada pemberitaan dari media yang dianggap merugikan dan mencemarkan nama baiknya, menurut Arif, masyarakat berhak untuk melaporkannya. Selain meminta hak jawab kepada media, ada prosedur lain yang bisa dilalui masyarakat yaitu melaporkan kepada Dewan Pers. Dewan Pers lah yang kemudian akan memeriksa dan menyelidiki laporan tersebut. Jika kemudian ternyata media yang bersalah, maka Dewan Pers tidak segan-segan untuk memberi himbauan kepada media yang bersangkutan untuk menyiarkan hak jawab seperti yang diinginkan pihak pelapor.

“Jika ternyata himbauan dari Dewan Pers tersebut juga tidak dijalankan media yang bersangkutan, maka masyarakat yang dirugikan bisa melaporkannya kepada kepolisian alias memidanakan dengan membawa salinan laporan dari Dewan Pers. Selanjutnya tentu pihak kepolisianlah yang akan menyelidiki kasus tersebut,” ungkap Azul, begitu Arif Zulkifli biasa disapa. (Ayu)/foto:eka hindra, andri/parle/iv.

## Silahkan Presiden Terpilih Bereksperimen Zaken Kabinet

Belum selesai soal koalisi antar parpol untuk pemilu Presiden Juli mendatang, berbagai wacana untuk pembentukan Kabinet telah muncul. Ada usulan dibentuknya Kabinet Koalisi dan Kabinet Ahli (Zaken Kabinet). Terhadap usulan pembentukan kabinet ahli atau diisi oleh kalangan profesional (Zaken Kabinet), anggota DPR Hadjrianto Tohari menyatakan bahwa menteri adalah jabatan politis. Karena itu penentuan atau penunjukan seorang menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Saat berbincang dengan Parlemenaria di kediamannya, Komplek Perumahan Menteri, Kuningan, Jakarta, politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam sistem Presidensial yang kita anut maka penunjukan seseorang menjadi menteri adalah hak penuh Presiden terpilih.

Namun patut diketahui, pemilu legislatif yang berlangsung 9 April lalu menghasilkan sistem multi partai



Anggota DPR Hajrianto Thohari (F-Golkar).

dimana 10 partai yang lolos ambang batas 3,5% (*parlementary threshold*). Hasil pemilu yang menunjukkan perim-

bangun perolehan suara membuktikan tidak ada partai mayoritas sehingga memunculkan pemerataan kekuatan

peta politik.

Salah satu capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo sejak awal sudah menegaskan menolak koalisi transaksional. Parpol yang mendukung pencalonannya tidak dijanjikan kuota kursi di kabinet seandainya kelak terpilih menjadi Presiden. Dia menjanjikan akan membentuk zaken kabinet yang berisi orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Kalaupun ada kader dari parpol yang terpilih bukan karena

pertimbangan politik tetapi memang karena kemampuannya dibutuhkan dan dianggap mampu mengemban amanat di pemerintahan yang baru.

“Silahkan saja, Presiden terpilih nanti bereksperimen dengan zaken kabinet,” tandas Hadjrianto. Namun dia mengingatkan pemilu kali ini tidak ada pemenang mayoritas. PDI Perjuangan pun masih harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres.

Pimpinan MPR ini menyangsikan konsep Zaken Kabinet seperti apa yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih, jika partai pengusungnya saja tidak memperoleh suara mayoritas. “Saya belum bisa membayangkan, jika benar Zaken Kabinet dibentuk, nasib menteri-menteri ketika berhadapan dengan kekuatan di parlemen untuk menggolkan program-programnya,” pungkas Hadjrianto. (mp,od)/foto:odjie/parle/iw.

## DPR Sesalkan 253 Siswa SMU Tak Bisa Ikut UN

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifa sesalkan adanya 253 siswa SMU yang tidak bisa ikut Ujian Negara (UN) pekan lalu. Hal tersebut diungkapkan politisi dari Fraksi PKS ini usai menerima laporan para Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam rapat Audiensi baru-baru ini di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Kami tentu sangat menyesalkan adanya siswa SMU yang tidak diijinkan mengikuti UN, meski alasannya ada yang sedang hamil, menikah, ditahan karena kasus narkoba dan ABH (anak berhadapan dengan hukum) lainnya. Karena apapun hasil UN tersebut itu urusan nanti, yang terpenting anak atau siswa tetap menerima haknya untuk mengikuti UN,” ungkap Ledia.

Oleh karena itu, bersama dengan KPAI, Komisi VIII akan mengajukan permohonan UN susulan untuk ke-253 siswa SMU tersebut. Sementara itu, Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba menghubungi Diknas untuk mengajukan hal tersebut. Namun belum ada kepastian tentang usulan tersebut.

Pada kesempatan itu Ni'am mengatakan bahwa selama proses UN tingkat SMU berlangsung pekan lalu, KPAI terjun langsung ke lapangan untuk



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifa (F-PKS).

meninjau dan mengetahui apakah selama berlangsungnya proses UN hak-hak siswa yang notabene merupakan anak sudah terpenuhi seutuhnya. 253 siswa SMU yang tidak bisa ikut UN itu berada di wilayah Surabaya, Jember, Sumenep, Trenggalek dan Madura.

Selain itu, Niam juga mengatakan bahwa setelah berlangsung UN pihaknya menyurvei siswa di 6 propinsi, sebanyak 65,9 persen mengatakan bahwa soal-soal UN tidak sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah.

“Kondisi demikian tentu akan berdampak pada psikologis anak, ini sangat ironi. Soal UN tidak sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah,” jelas Ni'am.

Oleh karena itu ia berharap DPR khususnya Komisi VIII sebagai mitra kerjanya dapat membantunya menyelesaikan hasil temuan tersebut kepada pihak-pihak terkait. (Ayu) foto : andri/parle / iw.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

www.dpr.go.id

Humas Setjen DPR RI

Email:

Sms Pengaduan: 0811 944 3344

Twitter DPR RI: @DPR\_RI



Kepala Biro Humas Djaka Dwi Winarko menerima rombongan studi tur STIA YPPT Priangan Timur, Tasikmalaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta

Foto:Andri/Parle/hr.

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka saat jumpa pers menyambut peringatan Hari Buruh 1 Mei 2014.

Foto: Naefurodjie/Parle/hr.

Suasana Peringatan Hari Buruh di Stadion GBK Jakarta.

Foto: Rizka/Parle/hr.





Kegiatan Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima tamu-tamu.

Foto: Rizka, Andri, Naefurodjie/Parle/hr.

## Nurul Arifin: Saya Akan Tetap 'Move On'

Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin mengatakan bahwa dirinya akan tetap 'move on' (melangkah kedepan-red) dan keluar melihat apa yang bisa dilakukannya setelah tidak terpilih kembali menjadi anggota Parlemen periode 2014-2019 mendatang.

"Saya menerima kekalahan ini, saya legowo, dan saya tidak ingin terpuruk lama dalam persoalan ini, saya ingin 'move on'," kata Nurul Arifin saat menyampaikan refleksinya di hadapan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (28/4).

"Jadi refleksi yang ingin saya lakukan saat ini adalah, pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilih saya di Karawang, Kab. Bekasi, dan Purwakarta sebanyak 65.859 orang yang merupakan suara sah saya, suara yang sangat murni dimana saya bekerja, kampanye door to door, bertatap muka, memberikan pendidikan politik dan sebagainya. Kedua, saya ingin memberikan selamat kepada seluruh teman caleg dari dapil saya yang masuk ke DPR dan ketiga, saya berharap mereka bisa bekerja lebih baik daripada kami," katanya.

Ia menambahkan, bahwa demokrasi itu adalah sebuah pilihan dan bagaimana kita harus selalu membenahinya, karena ini adalah satu konsekuensi yang harus dijalani.

"Saya pribadi masih bertugas sebagai anggota Komisi II DPR sampai bulan September nanti, saya masih punya tugas-tugas untuk menyelesaikan UU Pilkada, Pemda, dan MD3," terang Nurul.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa dirinya, nanti setelah tidak menjadi anggota DPR akan tetap bekerja di politik, "Saya tetap akan berkomitmen untuk partai saya, dan seka-



Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin (F-PG).

rang ini saya lebih banyak waktu untuk politik," tukasnya.

Nurul juga akan tetap komit dengan isu-isu yang ia tekuni selama ini, yaitu isu *good governance* dimana ia terlibat di kemitraan dan *partnership*, isu-isu tentang gender perempuan, dimana menjadi latar belakang aktifitasnya selama ini, juga di isu lingkungan hidup, HIV AIDS, serta masalah pluralisme multikulturalisme beserta Bhinneka Tunggal Ika.

"Saya kira ini yang akan terus saya lakukan, jadi sekali lagi, terima kasih buat dukungan teman-teman semuanya, dan para pemilih saya didapil saya Kerawang, Kab. Bekasi dan Purwakarta," ujarnya.

Di kesempatan ini, Nurul memberikan beberapa catatan kritis yang telah ia persiapkan. "Catatan kritis ini saya buat atas masukan yang saya terima dari Tim saya di lapangan," tegasnya. (nt)/foto:andri/parle/iw.

## Kematian Tersangka JIS di Kantor Polisi Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono mempertanyakan meninggalnya salah seorang tersangka kasus kejahatan seksual JIS (Jakarta International School) di Polda Metro Jaya. Ia menilai ada unsur kelengahan sehingga tersangka luput dari perhatian petugas.

"Sangat disayangkan bagaimana bisa tersangka yang dalam pemeriksaan dan pengawasan polisi bisa me-

ninggal. Kasus JIS ini sedang mendapat sorotan masyarakat jadi penyelidikan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di kantor polisi harus disampaikan kepada publik," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/4/14).

Lebih jauh menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini kasus JIS juga mendapat perhatian dunia internasional terlihat dari sejumlah liputan media asing. Baginya keberhasilan polisi

mengungkap kasus ini juga penting bagi bangsa.

"Pengungkapan kasus ini sangat diharapkan oleh masyarakat sekaligus membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia," tegas wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VI, Kota Depok-Bekasi ini.

Sebagaimana dilaporkan media, Azwar satu dari lima tersangka dite-



mukan petugas dalam keadaan kritis di toilet Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, disela pemeriksaan tersangka minta izin untuk buang hajat.

Petugas luput memperhatikan ketika tersangka nekad meminum cairan pembersih kamar mandi. “Tersangka diduga meminum cairan tersebut untuk bunuh diri,” jelasnya. Upaya otopsi telah dilakukan namun pihak keluarga tidak memberikan izin. (iky)/foto:andri/parle/iw.

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono (F-PD).

## Suvenir Sekretaris MA Pantas Disita Negara

Anggota Komisi III DPR RI Desmon J. Mahesa menilai positif langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta souvenir pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diserahkan kepada negara. Penetapan itu perlu untuk menjaga moral aparat negara, terhindar dari gratifikasi sehingga dapat terus bekerja secara profesional.

“Saya mendukung kalau kategori hadiah seperti itu sudah termasuk gratifikasi. Bukan hanya Ipod yang harus jadi perhatian KPK, saya dengar dalam paket souvenir juga ada makanan-coklat yang perlu diklarifikasi KPK,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/4/14).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut informasi adanya coklat itu diperolehnya dari sejumlah pihak yang sempat hadir dalam hajatan Sekretaris MA, Nurhadi tersebut. Ia sendiri mengaku mendapat undangan akan tetapi berhalangan hadir.

Lebih jauh menurut mantan aktivis ini, KPK perlu lebih proaktif menyelidiki asal usul harta pejabat negara yang memiliki kekayaan luar biasa. “Pejabat negara yang kaya ini biasanya mengaku menerima waris, KPK selidiki saja kebenarannya. Sekarang kalau kaya itu boleh saja yang penting sum-



Anggota Komisi III DPR RI Desmon J. Mahesa (F-Gerindra).

bernya jelas tetapi kalau aparat jangan pamer lah,” tandasnya.

Sebelumnya Komisi anti rasuah telah melakukan pemeriksaan terhadap alat pemutar musik Ipod yang diperkirakan dibagi kepada sekitar 2500 tamu. Harga dipasaran ternyata Rp700 ribu melebihi ketentuan harga hadiah

maksimal yaitu Rp500 ribu.

Para penerima diberikan waktu 7 hari mengembalikan souvenir tersebut kepada KPK. Sejumlah Hakim Agung, Pimpinan KY dan penyelenggara negara lain tercatat telah mengantarkan souvenir tersebut ke kantor KPK. (iky)/foto:iwanarmanias/parle.

# Anggota Dewan Minta Hentikan Semua Ospek

Anggota DPR Zulfadhli mendesak kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) di semua jenjang perguruan tinggi supaya dihapus. Ospek harus diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan tidak mengancam keselamatan atau jiwa seseorang.

“Semua kegiatan Ospek hendaknya dihapus dan diganti dengan pola baru yang bermanfaat dan tidak membahayakan,” tandas Zulfadhli saat menghubungi Parlemen di Jakarta, Senin (28/4). Hal itu dikatakannya sehubungan meninggalnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Dimas Dikita Handoko (19) Jumat pekan lalu.

Diduga Dimas tewas akibat dianiaya oleh para seniornya pada Jumat (25/4/2014) malam. Kecurigaan keluarga muncul sebab sejak beberapa hari terakhir dia mengaku kerap mengalami tindak kekerasan dari para seniornya.

Menurut Zulfadhli, sebaiknya semua pendidikan dikoordinir oleh Kemendikbud sehingga ada satu kebijakan dan penyalahgunaan bisa diminimalisir. Kasus kekerasan yang menimpa Dimas juga pernah terjadi di perguruan tinggi yang lain termasuk perguruan tinggi yang setengah militer tersebut. Karena itu sesuai reses, pada pertengahan Mei mendatang, Komisi X akan mengundang Kemendikbud untuk mempertanyakan kasus tersebut.



Anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli (F-PG).

Di perguruan tinggi di bawah Kemendikbud, kata anggota Komisi X tersebut sudah menghentikan kegiatan ospek, namun di perguruan tinggi dibawah koordinasi kementerian lain belum tahu aturan yang diterapkan. Seperti diketahui, STIP dibawah koordinasi Kemenhub. Kekerasan lain pernah terjadi di STPDN yang berada dibawah kordinasi Kemendagri, sehingga ada mahasiswa yang mening-

gal dunia saat ospek.

Politisi Partai Golkar ini mendesak, aparat untuk mengusut secara tuntas kasus ini, sehingga yang terlibat harus dikenakan hukuman yang setimpal. Pelakunya harus dikenakan hukuman berat sehingga ada efek jera dan tidak terjadi lagi kasus serupa. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## Catatan Kritis Nurul Arifin Atas Pemilu Legislatif 2014

Berikut catatan kritis Nurul Arifin pada Pemilu 2014. Pertama, kecurangan terjadi berkolusi dengan penyelenggara pemilu. Kedua, memesan suara melalui tim dengan kontrak politik. Ketiga, jika tidak sesuai target maka sisa kontrak tidak dibayar dan atau harus dikembalikan. Keempat, Form C6 yang diperjualbelikan sebagai daftar pemilih dan kelima, bom uang pada saat malam sebelum pencoblosan.

Selanjutnya, catatan evaluasi pasca pencoblosan menurut Nurul yang juga anggota dari Fraksi Golkar ini, yaitu, Pertama, kertas C1 yang diberikan PPS tidak berhologram, kedua, kertas C1 yang diberikan hanya berupa foto copy an, ketiga, kedua model diatas dimaksudkan untuk mengganti C1 setelah melakukan perubahan-perubahan pada angka-angka yang dikehendaki dengan menggunakan C1 yang asli dan berhologram, tanda tangan saksi di TPS dipalsukan, ke-



Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin (F-PG).

empat, jika caleg menggugat dengan menggunakan copy an C1 yang diperoleh di TPS disebutnya palsu karena tidak berhologram dan hanya foto copy an saja. Kelima, menggeser suara partai kepada caleg tertentu yang dikehendaki, keenam, menggeser suara caleg tertentu yang berpotensi mengalahkan caleg yang dikehendaki kepada caleg lain, sehingga kesannya pemenang yang menang dikehendaki dan tidak melakukan kecurangan .

Ketujuh, melibatkan PPK umumnya rekam suara tidak

disertai penyeteroran kotak dan kertas suara, kotak suara dibuang atau dimusnahkan agar tidak ada bukti. Kedelapan, hal seperti diatas diduga terjadi secara masif, anda hanya dapat mengetahuinya jika memiliki saksi disetiap TPS didapil. Sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh setiap caleg, karena umumnya caleg tidak menggarap semua dapil tapi terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Kesembilan, angka golput pada penghitungan hasil KPU berkurang karena banyak kertas suara yang tidak terpakai dicoblos oleh PPS dan PPK untuk memenangkan caleg tertentu, dan sepuluh, kotak suara sudah tidak tersegel artinya sudah dibuka sebelum pleno PPS dilaksanakan.

“Jadi ini 10 poin yang menjadi catatan saya, kemudian saya juga mencatat untuk rekomendasi kedepan, KPU pusat mungkin mereka sudah cukup baik menjalankan mandatnya, menjalankan pekerjaannya tapi ditingkat bawah kita masih melihat bahwa oknum-oknum ini tidak berkerja sesuai dengan sistem yang telah kita persiapkan dengan bagus,” tegasnya.

Ia berharap, dikemudian nanti pendidikan politik harus terus dilaksanakan agar berkembang kesadaran politik bagi setiap warga negara, “Seperti yang telah dikatakan saya tidak menyalahkan rakyat mungkin rakyat memilih kita, dan mungkin juga suara-suara kita yang digeser kepada caleg-caleg yang lain,” tandasnya. (nt)/foto:andri/parle/iw.

## Jika Diperlukan Cabut Ijin Lembaga JIS



Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (F-PG).

Cabut Ijin Lembaga JIS, jika diperlukan! Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily saat rapat audiensi dengan

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Jumat (25/4) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“Kasus pelecehan seksual terhadap anak di JIS (Jakarta International School), ini menjadi sebuah bukti adanya problem dari sebuah sistem perlindungan anak di sekolah atau lembaga tersebut memang tidak mendukung. Oleh karena itu saat muncul laporan adanya pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan JIS baik di TK maupun di SD, itu memang tidak memungkinkan anak betul-betul dihormati sebagai anak. Oleh karena itu menurut saya, tidak hanya TK yang memang tidak memiliki ijin, SD nya bahkan lembaga atau yayasannya juga dicabut,” tegas Ace Hasan.

Ditambahkan Ace, jika belakangan terkuak adanya buron FBI pelaku phedofilia yang kemudian memunculkan dugaan adanya sindikat phedofilia internasional, ini harusnya menjadi

perhatian pihak-pihak terkait, kepolisian dan petugas yang menangani phedofilia internasional.

Dengan kata lain, dilanjutkan politisi dari Fraksi Golkar, sistem deteksi dini perlindungan negara kita terhadap anak masih sangat lemah. Sehingga seseorang yang dianggap dunia in-

ternasional phedofilia saja, tidak bisa terdeteksi oleh pihak keamanan Indonesia. Ironisnya, ini baru diketahui belakangan. Padahal menurut Ace, setiap orang yang masuk ke Indonesia ada rekam jeaknya. Sehingga buron Phedofilia FBI seharusnya bisa tanggap atau paling tidak, tidak dapat masuk ke Indonesia.

Disini Ace melihat pihak JIS tidak memiliki niat yang baik untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Malah melakukan pembiaran terhadap perlakuan dan kondisi lingkungan pelecehan anak. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

## Sekjen DPR Terima Delegasi DPRD Komering Ulu Timur



Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan pendidikan di daerah perlu diawasi secara seksama, mengingat adanya kendala sertifikasi dan kurikulum. Kedua masalah yang diberlakukan pemerintah tersebut membuat para guru dan orang tua murid di daerah menjadi resah tidak menentu.

Demikian dikatakan Sekjen DPR usai menerima delegasi DPRD Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera

Selatan di ruang rapat Sekjen DPR, Lantai 3 Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Jumat (25/4) siang.

Menurut Win, panggilan akrab Sekjen DPR, sebaiknya memang hal seperti ini disampaikan ke Komisi X DPR, mengingat Komisi inilah yang membidangi masalah pendidikan.

“Sebaiknya diadakan dialog antara Anggota Komisi X DPR dengan Anggota DPRD untuk membicarakan masalah pendidikan di daerah yang selama ini terkendala,” ungkapnya.

Win menambahkan, jika memang betul-betul ingin bertemu dengan anggota Komisi XDPR sebaiknya membuat janji terlebih dahulu, karena saat ini sedang reses. Kebetulan banyak anggota yang sedang mengawal perhitungan suara hasil Pemilu Legislatif.

Ia menghimbau, anggota DPRD sebaiknya tidak hanya datang ke DPR saja akan tetapi juga datang ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena Mendikbud yang menangani langsung tentang masalah pendidikan.

Sementara Pimpinan Rombongan Anggota DPRD Sucipto mengatakan, memang sebetulnya akan datang ke Komisi X DPR. Namun karena sedang reses dan sedang mengunjungi konstituennya masing-masing, anggota Komisi X tidak siap menerimanya.

Masalah pendidikan, kata Sucipto memang perlu ditelaah karena masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang berbeda, maka perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi kendala seperti sekarang ini. (spy)/foto:andri/parle/iw.

## Revisi UU Perlindungan Anak Sangat Mendesak

Perlu segera merevisi Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, selain mencabut ijin lembaga atau yayasan JIS. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah usai rapat audiensi dengan KPAI, Jumat (25/4) di Gedung DPR Senayan Jakarta.

“Tadi teman-teman Komisi VIII memberi masukan untuk mencabut ijin lembaga JIS, karena seharusnya sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi anak, yang ramah anak. Jika sekolah malah berkontribusi besar terhadap terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, maka Kemendikbud harus meninjau ulang, melihat secara cermat pendidikan yang



Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah (F-PKB).

dilakukan di lingkungan JIS tidak hanya TK yang bagian kecil di lingkungan itu. Bisa saja itu terjadi di SD, SMP dan SMA. Selain itu yang harus dilakukan adalah segera revisi terhadap UU Perlindungan Anak atau UU No.23 Tahun 2002,” jelas Ida Fauziyah.

Sebenarnya dikatakan Ida, usulan revisi UU Perlindungan Anak pernah disampaikan, namun ditolak Badan Legislatif

(Baleg) mengingat masih ada PR (pekerjaan rumah) bagi Komisi VIII terhadap Undang-undang lain yang lebih urgent.

Dilanjutkan Ida, revisi tersebut menyangkut sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan terhadap anak. dimana dalam Undang-undang saat ini hukumannya masih sangat rendah, 3-15 tahun. Hal tersebut menurut Ida, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Sementara bagi korban, pelecehan tersebut bukan tidak mungkin akan diingat seumur hidupnya.

“Hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual saat ini tidak memberikan efek jera, kami akan revisi undang-undang tersebut dengan memasukkan hukuman terberat seumur hidup,” tegas Ida.

Selain itu yang harus direvisi adalah menyangkut kewenangan KPAI untuk dapat memberikan peran yang lebih maksimal lagi terhadap perlindungan anak Indonesia, tidak sekedar melakukan kordinasi. Bahkan bukan tidak mungkin Komisi VIII juga akan meningkatkan anggaran KPAI, agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Menurut Ida, karena keterbatasan dana atau anggaran terkadang menjadi hambatan bagi KPAI untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil.

(Ayu)/foto:andri/parle/iw.

## Kebijakan Subsidi Pupuk Belum Bantu Petani

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menemukan fakta lapangan, sejumlah petani masih kesulitan mendapatkan pupuk karena kurangnya pasokan. Kondisi ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya sehingga dalam kerangka upaya memperkuat ketahanan pangan kebijakan subsidi pupuk harus ditinjau ulang.

“Saya tidak paham kenapa pemerintah memberikan subsidi pupuk sangat kecil, padahal ini terkait ketahanan pangan bangsa. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan subsidi energi yang sangat besar itu,” kata Tim Kunker Ibnu Multazam saat meninjau Bulog Pajangan Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (30/4/14).

Dalam sejumlah rapat kerja ung-



Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam (F-PKB).

kap Wakil Ketua Komisi IV ini, pemerintah mengakui jumlah pupuk yang beredar memang masih kurang. Untuk tahun 2014 kekurangannya mencapai 1,7 juta ton.

“Jadi kalau ingin membantu petani, kalau ingin merealisasikan swasemba-

da pangan maka subsidi pupuk itu harus dikoreksi. Target ketahanan pangan bisa kita capai dengan sempurna,” tegasnya.

Pada bagian lain Politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta Bulog memberikan perhatian terhadap beras raskin yang kualitasnya rendah. “Bulog dan mitranya perlu memperbaiki kualitas jangan sampai ada beras yang bau serta banyak batunya,” ujarnya.

Hal lain yang tidak kalah penting menurutnya adalah koreksi data penerima raskin secara berkala. Kemiskinan itu menurutnya dinamis, bisa berkurang dan juga bisa bertambah. BPS seharusnya tiap tahun melakukan pendataan ulang jika menginginkan data yang otentik. (spy)

# Antisipasi Infeksi Virus MERS, Tertibkan Biro Umrah Nakal



Anggota Komisi VIII DPR Kasma Bouty bersama Wakil Ketua Komisi VIII saat Kunjungan ke Papua Barat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kasma Bouty meminta Kementerian Agama untuk tertibkan biro perjalanan umrah yang nakal dengan mempermudah dapatkan kartu kuning tanpa harus melalui pemeriksaan kesehatan yang semestinya. Hal itu diungkapkan Kasma Bouty terkait dengan adanya jamaah umrah Indonesia yang meninggal karena terinfeksi virus MERS-CoV.

“Kartu Kuning merupakan syarat pemeriksaan kesehatan, termasuk di dalamnya pemberian vaksin anti virus. Memang untuk mendapatkan kartu itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Biayanya pun tidak murah. Namun terkadang ada biro atau travel umrah yang menjanjikan kemudahan untuk mendapatkan kartu kuning, tanpa harus melewati prosedur pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi,” papar Kasma kepada Parle, Jumat (2/5).

Ditambahkan politisi dari Fraksi Demokrat ini, kemungkinan besar karena hal itulah yang menyebabkan ada jamaah Indonesia yang terjangkit virus atau penyakit di tanah suci, bahkan terakhir terinfeksi virus MERS. Kasma berjanji ke depan akan meminta penjelasan kepada Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta Kementerian Kesehatan.

“Virus ini kan sebenarnya bukan hal yang baru lagi, tetapi kok masih ada jamaah Indonesia yang terkena, pasti ada sebuah sistem atau mekanisme yang dilanggar yang menyebabkan semua itu bisa lolos. Nanti kita akan undang Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui penyebab pastinya, dan tentu penanganan terha-

dap kasus virus MERS ini,” tegas Kasma Bouty.

Seperti yang dilansir berbagai media massa luar, pihak Arab Saudi Kamis (2/5) mengumumkan jumlah kasus penderita *middle east respiratory syndrome* (MERS-coV) bertambah dua kali lipat. Sebanyak 36 kasus telah dilaporkan dalam tiga hari terakhir. Kasus-kasus baru ini menambah jumlah pasien yang diduga menderita flu arab.

Saat ini sebanyak 381 orang dikonfirmasi terinfeksi virus MERS-CoV. Bertambah 20 orang dari jumlah sebelumnya 361. Kasus terbaru flu Arab ini dilaporkan terjadi di Riyadh, seorang pria berusia 77 tahun dan bayi sembilan bulan. Perempuan Saudi berusia 65 tahun, serta perempuan asal Indonesia berusia 61 tahun di Jeddah.

Dengan semakin bertambahnya jumlah kasus penderita flu arab ini, pihak Internasional khawatir, mengingat bulan Juli mendatang, selama bulan Ramadhan banyak warga negara asing yang datang ke Arab Saudi untuk beribadah. Diikuti pada bulan Oktober, jumlah warga negara asing yang datang ke Arab Saudi akan semakin banyak karena pada bulan tersebut merupakan musim haji.

Untuk mengatasi hal itu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini telah mengirimkan dokter ahli dan peneliti. Pejabat WHO mengatakan penyebaran virus ini sudah sangat berbahaya, hal ini karena dalam waktu singkat virus bisa menyebar ke banyak negara lain seperti Qatar, Oman, Yordania, Uni Emirat Arab, Prancis, Italia, Filipina, Tunisia, Jerman, Yunani, Prancis, Irlandia, dan Malaysia. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.



## Komisi III Dukung KPK Dalam Masalah Royalti Tambang



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi mengatakan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami sejumlah persoalan royalti pertambangan di tanah air. Para pelaku dibidang ini menurutnya telah menggerogoti potensi penerimaan keuangan negara yang

nilainya cukup besar.

“Sejak awal kita sudah meminta KPK untuk memiliki prioritas dalam pemberantasan korupsi. Kasus kakap itu sebenarnya ada di pertambangan, perpajakan dan bidang lain yang menghalangi upaya negara untuk memperoleh pemasukan yang akan digunakan dalam program menyejahterakan rakyat,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/4/14).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini menambahkan dalam rapat dengar pendapat dengan KPK permasalahan ini selalu ditekankan oleh komisi yang membidangi masalah hukum ini. Perlu ada semacam *road map* pemberantasan korupsi sehingga KPK tidak terkesan bekerja berdasarkan pesanan atau tebang pilih.

“Kita sudah meminta agar masalah

korupsi di bidang pertambangan ini jadi fokus karena potensi kerugian negara cukup besar, mencapai Rp28 triliun setiap tahunnya,” tambah wakil rakyat yang menyelesaikan pendidikan S2-nya di ITB Bandung ini.

Sebelumnya dalam acara diskusi tentang pertambangan di Palembang, Sumsel, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Zulkarnaen menyatakan lembaganya sedang membidik kasus royalti pertambangan. Ia menilai kebocoran royalti akibat buruknya sistem administrasi dan perpajakan pada hampir sebagian besar usaha pertambangan mineral dan batu bara.

“Sistem pengawasan di bidang ini memang belum terbangun secara baik mulai dari longgarnya penerbitan izin usaha. Sejumlah kasus terjadi merata di seluruh tanah air,” demikian Zulkarnaen. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr.

## Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Tunggu Putusan MA

Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin meminta segenap pihak dapat menghormati proses hukum kasus dugaan salah tangkap pelaku kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Dicky Maulana di Cipulir, Jakarta Selatan. Berdasarkan sistem hukum yang ada, putusan bebas baru memiliki kekuatan hukum tetap apabila Mahkamah Agung telah mengumumkan hasil kasasi.

“Kita tentu prihatin kalau benar salah tangkap. Tapi tunggulah, masih ada proses kasasi di MA jadi putusan bebas Pengadilan Tinggi (PT) belum *inkracht*. Jadi upaya menuntut ganti rugi harus menunggu,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/4/14).

Politisi Fraksi PDIP ini juga meminta publik tidak cepat menyalahkan penyidik kepolisian setelah diterimanya upaya banding di PT. Bagaimanapun setiap hasil penyidikan sudah mele-



Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin.

wati proses eksaminasi oleh jaksa dan hakim di pengadilan.

“Hasil penyidikan sebelum sampai ke persidangan itu sudah diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Kalau misalnya tidak lengkap saksi dan barang bukti, pasti akan dikembalikan. Jadi ada P18, P19 sehingga harus dilengkapi. Lain

cerita kalau ternyata ada bukti baru,” jelas mantan Kapolda Sumut ini.

Nurdin sepakat apabila kasasi diterima MA, maka setiap warga negara yang telah dirugikan dalam proses hukum yang salah sangat pantas mendapat kompensasi dari negara.

Sebagaimana diberitakan media, LBH Jakarta membantu perjuangan dua pengamen Andro dan Nurdin mencari keadilan. Setelah divonis PN Jaksel 7 tahun penjara, mereka mendapat putusan bebas dari PT setelah penasehat hukum berhasil menghadirkan pihak lain yang mengaku melakukan pemu- kulan terhadap korban.

Dalam kasus ini Andro dan Nurdin disebut menemukan korban dalam kondisi kritis dan berinisiatif melapor ke polisi. Mereka kemudian malah dijerat dan ditahan 10 bulan penjara selama proses pemeriksaan. (iky) foto: andri/parle/hr.

# Pendidikan Indonesia Harus Semakin Baik

Tepat hari ini, Jumat (2/05), Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Banyak harapan diungkapkan agar kondisi pendidikan Indonesia semakin baik. Tak terkecuali wakil rakyat di Parlemen.

“Insya Allah kondisi pendidikan semakin baik dan sesuai harapan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga, pendidikan kita semakin *applicable*, dan memperkuat pendidikan Indonesia. Kemajuan masyarakat Indonesia paling pokok berasal dari kemajuan pendidikan Indonesia itu sendiri,” kata Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto saat dihubungi Parle via telepon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur berharap, dengan diterapkannya Kurikulum 2013, Indonesia dapat mengejar negara-negara yang dianggap maju dalam pendidikannya.

“Dengan Kurikulum 2013 ini diharapkan kita tidak kalah



Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto.

dengan negara yang kita anggap lebih maju pendidikannya, seperti Korea, Jepang, maupun negara lainnya. Pendidikan Indonesia harus diperbaiki secara profesional ke depannya, terutama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Tinggi,” ujar Politisi dari Dapil Kepulauan Riau ini.

Terkait dengan kekerasan terhadap siswa yang terjadi akhir-akhir ini, Asman mengakui akibat dari lemahnya pengawasan. Sehingga, pengawasan terhadap sekolah, terutama sekolah internasional harus ditingkatkan.

“Soal kekerasan di sekolah, ini akibat kurangnya pengawasan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pelayanan bidang pendidikan kita masih jauh dari yang diharapkan,” tegas Politisi PAN ini. (sf) foto: odjie/parle/hr.

## Komisi X Akan Tinjau UN SMP



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur.

Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama akan digelar secara serentak mulai Senin (5/05). Untuk memastikan UN berjalan dengan lancar, Komisi X DPR RI akan meninjau beberapa SMP di Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan Ujian Nasional ini.

Kami ingin memastikan bagaimana distribusi soal, maupun hal-hal lain teknis terkait pelaksanaan UN,” kata Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto ketika dihubungi Parle via telepon, Jumat (2/05).

Namun, lanjut Agus, kunjungan Komisi X ini jangan sampai mengganggu konsentrasi siswa saat mengerjakan ujian. Sehingga, Anggota Komisi X tidak akan mendatangi kelas per kelas ketika ujian berlangsung.

“Kami tidak ingin mengganggu ketika anak-anak konsentrasi mengerjakan UN. Sehingga kedatangan kami jangan sampai diketahui siswa. Kami hanya akan di depan sekolah, ataupun di kantornya. Kita akan berdialog dengan kepala sekolah maupun pelaksana, apakah menemui kesulitan atau tidak ketika melaksanakan ujian,” jelas Politisi Demokrat ini.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur. Ia menyatakan, kunjungan ini juga ingin melihat efektifitas dari UN, sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan UN.

“Kita akan menilai efektivitas UN ini untuk dijadikan alat ukur pendidikan Indonesia. Ke depannya, UN ini akan dievaluasi secara total. Maka dari itu, dari sisi persiapannya, pelaksanaannya, kemudian hasilnya, ini akan dijadikan alat ukur pendidikan di Indonesia,” imbuh Politisi PAN ini.

Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ini rencananya akan dimulai pada Senin (5/05), dengan agenda pertemuan dengan penyelenggara pendidikan di daerah seperti Kepala Dinas Pendidikan, Panitia Pelaksanaan UN, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, PGRI, maupun instansi terkait lainnya. (sf) foto: odjie/parle/hr.

# Komisi IV DPR Desak Pemkab Gunung Kidul Berikan Perhatian Bagi Petani Kakao



Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam (F-PKB) dan beberapa anggota Komisi IV DPR saat meninjau perkebunan Kakao Gunung Kidul, DIY.

Komisi IV DPR meminta Pemda Kabupaten Gunung Kidul memberikan perhatian khusus bagi Petani Kakao Banyu Soca Playen. Sehingga diharapkan masyarakat petani kakao dapat merekayasa serta memproduksi dan mengolah kakao menjadi coklat sendiri.

Hal itu mengemuka saat Komisi IV DPR melakukan dialog dengan Petani Kakao Banyu Soca Playen Gunung Kidul Yogyakarta, baru-baru ini.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam, selama ini kakao dihasilkan di Indonesia selalu dibawa keluar negeri kemudian kembali lagi ke Indonesia sudah berubah wujud menjadi makanan favorit yaitu coklat.

Ibnu Multazam yang sekaligus memimpin rombongan Kunjungan Kerja Komisi IV ke Propinsi DI Yogyakarta menambahkan, Indonesia salah satunya Gunung Kidul merupakan salah satu penghasil kakao tapi belum bisa mengolahnya seperti negara-negara

asing contohnya Italia, Swis, dan Belgia serta negara-negara asing lainnya.

Dia mengemukakan, kemampuan dan semangat yang luar biasa dari masyarakat petani kakao untuk memproduksi coklat dengan segala turunannya itu sangat dimungkinkan sekali, dan itu seharusnya bisa dilakukan walaupun masih sangat perlu pelatihan, serta ilmu pemasarannya itu pasti bisa.

Dia menambahkan kembali, Komisi IV DPR sudah cukup peduli mengingat sejak tahun 2004 Komisi IV DPR memberikan perhatian dengan melalui Gerakan Menanam Nasional (Gernas). “Karena itu Komisi IV DPR kali ini datang ke Gunung Kidul untuk melihat dan membuktikan seperti apa hasilnya dan ternyata sekarang sudah maju dan berkembang dengan cepat dan sangat baik,” kata Ibnu.

Namun demikian, lanjutnya, perlu *follow up* tindak lanjut dari kegiatan

Gernas tersebut seperti apa hasilnya, dijual mentah, atau setengah jadi atau sudah jadi. “Dalam rangka membina kesinambungan tanaman kakao itu harus dilakukan tanaman yang sambung menyambung,” katanya.

Mengenai masalah bibit serta pupuk yang digunakan oleh para petani kakao, Ibnu mengatakan, ada kemungkinan mereka juga menggunakan pupuk yang bersubsidi walaupun dari sisi programnya petani kakao tidak termasuk pengguna pupuk yang bersubsidi akan tetapi mereka bisa saja menggunakan pupuk yang bersubsidi.

“Sudah saatnya Provinsi DI Yogyakarta khususnya Kabupaten Gunung Kidul membuat produk unggulan, tidak hanya memproduksi Bakpia Patuk saja akan tetapi sudah mulai dipikirkan ke depan membuat dan mengolah sendiri yaitu coklat produksi Gunung Kidul Yogyakarta,” harapnya. (Spy) foto: *supri/parle/hr*.



Dalam Masa Reses, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning memimpin RDPU dengan Tim Satgas Monitoring Outsourcing BUMN, Rabu (23/4) Foto: Naefurodjie/Parle/HR.



Dalam Masa Reses, Pimpinan Komisi X audiensi dengan KPAI terkait Pelecehan Seksual di JIS, Rabu (23/4) Foto: Naefurodjie/Parle/HR.



Anggota Komisi IX Indra saat bicara dalam acara Semangat Pagi dengan TV Parlemen, Selasa (29/4). Foto: Andri/Parle/HR.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti foto bersama dengan Anggota DPRD Komisi IV Ogan Komering Ulu Timur, Jumat (25/4). Foto: Andri/Parle/HR.